

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelanggaran Pemasangan APK, Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Kediri.

ABSTRACT

This research discusses Law Enforcement of Violations of the Installation of APK (Campaign Props) for the 2024 Election in Kediri Regency. Bawaslu has carried out active and passive control since the start of the campaign period in accordance with Bawaslu Regulation article 42 paragraph 2 and PKPU Number 11 of 2023. The Kediri Regency Bawaslu succeeded in ordering as many as 4,091 violating APKs and declared confiscated. The type of research used is empirical legal research, which is legal research that analyzes the application of law in reality to individuals, groups, communities, and legal institutions in society by focusing on the behavior of individuals or communities, organizations or legal institutions in relation to the application or enforcement of the law. From all the data obtained both through interviews and requests for data related to violations of the installation of campaign props above, researchers can conclude that there are efforts to enforce violations as evidenced by Bawaslu have carried out their duties and authorities correctly, but there are elements that hinder them, such as undeterred sanctions, lack of social enthusiasm, time and supporting facilities, and efforts to manage campaign props. Related to the inhibiting factors in law enforcement against violations of the installation of campaign props in Kediri Regency in the 2024 election include sanctions that lack a deterrent effect, factors that lack social enthusiasm, limited personnel, limited facilities and facilities.

Keywords: Law Enforcement, Violations of APK Installation, 2024 Elections, Bawaslu Kediri Regency.

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Manfaat Secara Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Secara Praktis	9
1.5 Penelitian Terdahulu	9
1.6 Metode Penelitian	14
1.6.1 Jenis Penelitian	14
1.6.2 Pendekatan Penetian	14
1.6.3 Lokasi Penelitian.....	15
1.6.4 Bahan Hukum	15
1.6.5 Teknik Pengumpulan Data.....	16
1.6.6 Teknik Analisa Data	17
1.7 Sistematika Pembahasan	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
2.1 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	19
2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum	19
2.1.2 Bentuk Penegakan Hukum.....	20
2.1.3 Faktor Dalam Penegakan Hukum	22
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran.....	24
2.2.1 Pengertian pelanggaran	24
2.2.2 Jenis Pelanggaran.....	25
2.2.3 Faktor yang menyebabkan pelanggaran	26
2.2.4 Upaya Pencegahan dan Penaggulangan Pelanggaran.....	32
2.3 Tinjauan Umum Tentang Alat Peraga Kampanye.....	36
2.3.1 Pengertian Alat Peraga Kampanye.....	37
2.3.2 Bahan Alat Peraga Kampanye.....	40
2.4 Tinjauan Umum Tentang Pemilu (Pemilihan Umum) .	42
2.4.1 Pengertian Pemilu.....	43
2.4.2 Asas pemilihan umum	48
2.4.3 Lembaga Penyelenggaraan Pemilu	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
3.1 Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK) pada pemilu tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten kediri?.....	54
3.2 Kendala Penegakan Pelanggaran Pemasangan APK pada Pemilu Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Kediri ...	65
3.2.1 Faktor kurangnya kesadaran hukum.....	68

3.2.2 Faktor sanksi yang tidak memberi efek jera.....	70
3.2.3 Faktor kurangnya sosialisasi.....	73
3.2.4 Faktor keterbatasan waktu	74
3.2.5 Faktor saran dan fasilitas penunjang yang tidak memadai.....	74
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	76
4.1 Kesimpulan.....	76
4.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	81